

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cetakan ke-16. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2024.
- Hendra Sudrajat, dkk. *Metode Penelitian Hukum (Konsepsi dan Implementasi)*. Padang: Get Press Indonesia, 2025.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Cet. 9. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Marbun, S.F. *Hukum Administrasi Negara I*. Yogyakarta: FH UII Press, 2018.
- Marbun, S.F. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Cetakan ke-21. Jakarta: Prenada Media, 2025.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta Press, 2021.
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1986.

B. Jurnal Ilmiah

- Alacok Kahlasi, Maria Margaretha, dan Randy Vallentino Neonbeni. "Analisis Yuridis Batasan Kewenangan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik." *Dialog Legal* 1, no. 3 (2025).

- Amsari, Feri, dan Khairul Fahmi. "Akibat Hukum Keputusan Tata Usaha Negara dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021).
- Barros, Alberto Paul, David Yohanes Meyners, dan Mario A. Lawung. "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa di Desa Kamanasa dan Desa Harekakae Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2025).
- Dianto, dan Jasardi Gunawan. "Konflik Kepentingan dalam Proses Pergantian Antar Waktu Kepala Desa Labangka, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2023." *Al Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 6, no. 1 (2025).
- Gandara, Moh. "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat." *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020).
- Hidayat, Rahmat. "Mandat, Delegasi, dan Atribusi dalam Kewenangan Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum dan Administrasi Negara* 4, no. 2 (2021).
- Indara, Rona. "Problem Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) dalam Masa Peralihan Pemerintahan Daerah Sebelum dan Sesudah Pilkada Serentak." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 8, no. 2 (2025).
- Juita Siti Rahayu, dan Timbul Dompok. "The Implementation of Village Government Administration in Improving Public Services in Singkep Village, Lingga Regency, Riau Islands." *ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.53697/iso.v4i1.1688>.
- Murlinus. "Perlindungan Hukum Atas Terhadap Peraturan Kebijakan (Beleidsregel)." *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik* 1, no. 2 (2024).
- Nasruni, Raneu Febria, Aan Anwar Sihabudin, dan R. Didi Djadjuli. "Kewenangan Penjabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sandingtaman Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis."
- Nasution, Sutan Rais Aminullah, Agusmidah, dan Amsali Syahputa Sembiring. "Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (2022).

- Nur Yanto. "Akibat Hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang Cacat Wewenang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Ilmu Hukum* (2021).
- Pasaribu, N. T. "Tata Kelola Pemerintahan Desa." *Circle Archive* 1, no. 1 (2023).
- Pramudana, I. "Analisis Kewenangan Pelaksana Tugas dalam Pemerintahan." *Edu Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2, no. 1 (2023).
- Pramudana, Ibnu, dan Surya Perdana. "Analisis Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014." *EduYustisia* 2, no. 1 (2023).
- Prianto, Wahyu. "Analisis Yuridis Pemberhentian Perangkat Desa pada Desa Donggala Kabupaten Kolaka Tahun 2023." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.55551/jip.v4i2.66>.
- Rambe, Muhammad Juang. "The Authority of the Temporary Head of Village in Silangge Village Government System, Dolok District, North Padang Lawas Regency." *International Journal of Economic, Technology and Social Sciences* 2, no. 2 (2022).
- Saefullah. "Pengangkatan Perangkat Desa yang Tidak Sah dan Implikasinya terhadap Keabsahan Hak Keuangan APBDes: Analisis Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana." *Binamulia Hukum* 14, no. 2 (2025).
- Sari, Ayu Nurmala, dan Muhammad Yusrizal Adi Syaputra. "Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 7, no. 2 (2021).
- Singal, Gian Marvin, Tommy M.R. Kumampung, dan Roosje M.S. Sarapun. "Akibat Hukum Bagi Kepala Desa yang Tidak Melaksanakan Tugas dan Kewajibannya Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku." *Lex Crimen* 10, no. 13 (2021).
- Wereh, Agustien Cherly, dkk. "Kewenangan Diskresi Pejabat Administrasi Negara: Batasan dan Pengawasannya." *Jurnal Paradigma: Journal of Sociology Research and Education* 6, no. 2 (2025).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015.

D. Website

Gerbang Desa. “Kaur Perencanaan dan Tata Usaha Desa Gunung Besar Dipecat.” <https://gerbangdesa.com/kaur-perencanaan-dan-tata-usaha-desa-gunung-besar-dipecat/> (diakses 13 November 2025).

Hukumonline. “Pengertian dan Dasar Hukum Plh, Plt, Pjs, dan Pj.” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-dan-dasar-hukum-plh--plt--pjs--dan-pj-lt5924e3cc9cc8f/> (diakses 13 November 2025).

JDID Kabupaten Sukoharjo. “Pengertian Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas.” <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-pelaksana-harian-dan-pelaksana-tugas> (diakses 13 November 2025).

Liputan6. “Arti Plt: Pengertian, Fungsi, dan Penerapannya.” <https://www.liputan6.com/feeds/read/5901028/arti-plt-pengertian-fungsi-dan-penerapannya-dalam-berbagai-bidang> (diakses 13 November 2025).

Portal Hukum Indonesia. “Batas Waktu Surat Penunjukan Plt Kepala Desa.”
<https://portalhukum.id/opini-hukum/batas-waktu-surat-penunjukan-plt-kepala-desa-urgensi-kepastian-hukum-dalam-administrasi-pemerintahan/>
(diakses 13 November 2025).

Tembuku Desa. “Implementasi dan Tantangan Undang-Undang Desa.”
<https://www.tembuku.desa.id/artikel/2018/5/31/implementasi-dan-tantangan-undang-undang-desa>
(diakses 13 November 2025).

